

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

B. Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Ainur Rofieq, *"Pelayanan Publik Dan Welfare State"*, Governance, 2011

B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar maju, 1999

Dalam Kotan Y. Stefanus, *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara*, Yogyakarta: Univ. Atmajaya, 1998.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010

Hartarto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bekasi, Cakrawala Cendikia, 2018

Hesel Nogi S.Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P. 2003.

Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2002).

Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Bekasi, 2021

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008)

Jhon K. Mansell. *Flag State Responsibility (Historical Development and Contemporary Issues)*. Berlin, Springer: 2009

Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Lester, Lames V. & Joseph Stewart, Jr. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth. 2000.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Roda Karya, 1989

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung, Pustaka Kreasi Cipta, 2020

Otto, Michiel. *Terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung:Revika Aditama. 2006

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarata, 2008

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993

- Purba, Hasim, *Hukum Pengangkutan Laut Perspektif Teori dan Praktek*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2005
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Sadar Zainudin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, 1996
- Simatupang, M, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Medan, Kalangan Sendiri, 1994
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2008
- Solahuddin Kusumanegara ; *Model dan aktor dalam proses kebijakan publik*. EDISI, Ed.1,Cet.1 ; Penerbitan, Yogyakarta : Gava Media, 2010.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- SUHARNO. *Dasar-dasar kebijakan publik : kajian proses dan analisis kebijakan*,Yogyakarta, Ombak 2013.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009

C. Jurnal/Artikel

- Agustino, L. (2003). Analisis Kebijakan Pembangunan Di Desa Suligi Kecamatan Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9)
- Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, „*Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*“, *Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.2 (2018)
- Aminah Siti, Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Di Pt. Barwil Unitor Ships Service Semarang, TESIS Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 2007.
- Anis Idham, *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotek Kapal Laut dan Masalah Eksekusi Hipotik Kapal Laut Ditinjau dari Hukum Maritim*, Bandung, Alumni, 1995
- Erman Rajagukguk, “*Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara*”, Disampaikan pada Diskusi Publik Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006
- I Ketut Mudana, Peningkatan Pengawasan Keselamatan Angkutan Penyeberangan Lintas Palembang-Muntok, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog)*. 2014

Jaka Mulyata, Keadilan, *Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015

Jamil Bazarah, dkk, “*Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)*”, *Dedikasi Volume 22 No. 2*, Desember 2021

Melda Kamil, *Praktik Pembenderaan Kembali (Reflagging) pada Kapal Penangkapan Ikan*. Jurnal Hukum Internasional. Volume 1 Nomor 3 April 2004

Muhaimin Muhaimin, „*Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12.2 (2018)

Ni Ketut Riani, “*Strategi Peningkatan Pelayanan Publik*”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 11, April 2021

Nurianto, “*Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkan Berlandaskan Konsep “Welfare state?”*”, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3, September 2014

Osborne, David and Ted Gaebler. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*. Massachusetts: Addison Wesley Publishing, (1992)

Pahlevi Muhammad Satria, "*Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Madiun, Ponorogo, Skripsi*", Universitas Muhammadiyah, 2019.

Ratna Ani Lestari, S.Agus Santoso,"*Pelayanan Publik dalam Good Governance*", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Vol. 2 No. 1

Selvi Rianti, dkk,"*Kualitas Pelayanan Publik*", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 15, Nomor 3, Juli 2019*

Widjiastuti, Agustin, „*Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn*“, Perspektif, 22.2 (2017)

Wilyon Fanus, Tinjauan Yuridis Pembuatan dan Pengukuran Kapal Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan Pelabuhan Kota Batam. Skripsi. Universitas Internasional Batam 2019.

D. Media dan lain-lain

Chromextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BA B%20 I I.pdf, hlm 24, diakses pada tanggal 10 Agustus 2025

<http://maritimeIndonesia-mls.blogspot.com/2011/11/status-Hukum-kapal.html>, diakses pada tanggal 08 September 2025

<https://mh.uma.ac.id/mengenal-pengelola-pelabuhan/>, Diakses pada tanggal 25 September 2025

<https://oppriok.dephub.go.id/frontend/profil>, diakses pada tanggal 20 September 2025

Pas Besar, <https://pteks.id/layanan/pas-besar>, diakses pada tanggal 20 Agustus 202

Sri Sugiarti, *Pasal Pengangkutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, [http ://ugisukaba.blogspot.co.id/2016/03/pasal-pengangkutan-dalam](http://ugisukaba.blogspot.co.id/2016/03/pasal-pengangkutan-dalam-kuhperdata_3.html) kuhperdata_3.html, diakses pada tanggal 18 Agustus 2025.

